

## **Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek**

**Desi Nuryatul Safitri**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
*desinuryatul@gmail.com*

**Lantip Susilowati**

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung  
*lantip\_susilowati@yahoo.co.id*

### ***Abstract***

*This study aims to examine village original income and allocation of village funds as factors affecting village financial independence in Trenggalek Regency. The research approach used is a quantitative approach. The data used is secondary data in the form of a APBDes realization report of the Trenggalek Regency for the 2020 period. The data was obtained from the Trenggalek Regency Community and Village Empowerment Service. The population in this study amounted to 152 villages covering all villages located in Trenggalek Regency. From the total population, a saturated sample is taken (total sampling) with the aim that the information obtained is accurate. Some of the data obtained by the researcher contains extreme data that must be removed (outliers), so that the total sample used is 127 samples. Testing data using the IBM SPSS Statistic 25 program. This study obtained the following results: Village original income (PADes) affects village financial independence positively and significantly, Village fund allocation (ADD) affects village financial independence negatively and significantly, Simultaneously allocation of funds village (ADD) and village original income (PADes) significantly affect village financial independence.*

**Keywords:** *Village Original Income, Village Fund Allocation, Village Financial Independence*

### **A. PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwasanya desa mempunyai otoritas yang luas dalam mengelola urusan pemerintahannya untuk menumbuhkan tingkat kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakatnya. Dengan demikian, desa memiliki kesempatan untuk lebih mandiri dan otonom. Manajemen keuangan yang sehat sangat diperlukan dalam pelaksanaan pemerintahan desa yang otonom. Dalam hal ini, pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola potensi desanya dengan baik dan optimal untuk mencapai kemandirian desa.

Kemandirian desa merupakan hal yang perlu diwujudkan dalam pemerintahan desa. Kemandirian desa merupakan kemampuan desa dalam membiayai kebutuhannya sendiri yang dapat diwujudkan dengan upaya memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di desa serta kemampuan masyarakat desa sehingga desa tidak lagi bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat. Kemandirian desa ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya, baik dari

segi ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya. Kemandirian desa dapat diukur melalui kemampuan desa dalam membiayai belanjanya sendiri. Desa yang mandiri menjadi pilar utama kemajuan sebuah negara. Negara dapat dikatakan maju apabila masyarakatnya sejahtera. Desa dapat menjadi mandiri apabila potensi-potensi yang ada di desa dimanfaatkan dengan baik, sehingga tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa dan desa akan menjadi sejahtera. Kemandirian desa dapat diukur melalui kemampuan desa dalam membiayai belanjanya sendiri. Kemampuan desa dalam mengelola keuangannya dapat diukur dari pendapatan asli desa (PADes) yang merupakan sumber utama dalam penyelenggaraan otonomi desa. Desa yang mampu mengandalkan pendapatannya untuk membiayai pembangunannya sendiri tidak lagi bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat, sehingga desa dapat dikategorikan sebagai desa yang mandiri.

Dalam sistem pemerintahan desa, desa berhak untuk mengelola anggaran dari pemerintah untuk digunakan dalam berbagai kegiatan, termasuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi, atau kegiatan lain yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa (Atmadja et al., 2018). Keuangan desa yang berasal dari PADes, dana pemberian dari pemerintah, dan pendapatan lain-lain yang sah harus dikelola dengan optimal oleh pemerintah desa. Kekayaan desa juga harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Dengan pengelolaan keuangan serta kekayaan desa yang baik dan optimal dapat mendukung kemandirian keuangan desa. Jumlah pendapatan asli daerah yang tinggi dibanding total dana yang diperoleh dari pemerintah pusat menunjukkan semakin tingginya kemandirian suatu daerah (Andriani & Wahid, 2018). Oleh sebab itu, diperlukan manajemen keuangan serta kekayaan yang baik dan optimal untuk mengurangi tingkat ketergantungan desa terhadap anggaran keuangan dari pemerintah pusat sehingga desa dapat menjadi lebih mandiri dan sejahtera.

Program alokasi dana desa (ADD) juga mempunyai peran penting dalam mewujudkan kemandirian desa. ADD yang bersumber dari DAU (Dana Alokasi Umum) pemerintah pusat menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar dalam keuangan desa (Yulihantini et al., 2018). Salah satu tujuan adanya ADD yang tercantum dalam Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 ialah untuk menumbuhkan perekonomian desa dan masyarakatnya. Pelaksanaan program alokasi dana desa (ADD) dapat dikatakan berhasil jika belanja desa sudah terealisasi secara optimal serta kinerja keuangan desa efisien. Keberhasilan dan ketepatan alokasi dana desa ini dapat mendukung peningkatan kemandirian desa.

Adanya otonomi desa memberikan peran serta tugas yang lebih besar bagi pemerintah desa yang disertai dengan tanggung jawab yang besar dalam melakukan tata kelola pemerintahannya. Dalam hal ini, pemerintah desa dituntut untuk lebih inovatif dalam sistem pemerintahannya agar desa

menjadi lebih baik dan mandiri. Kemandirian desa dapat terwujud jika tingkat ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah pusat rendah. Strategi pengembangan desa sangat dibutuhkan dalam upaya pengoptimalan potensi sumber daya di desa. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dalam memberdayakan potensi yang terdapat di desa dapat mendukung peningkatan kemandirian desa (Endah, 2018).

Dalam bidang keuangan daerah, permasalahan yang umum terjadi dan harus diatasi oleh pemerintah daerah yaitu masih rendahnya kontribusi PAD dibandingkan kontribusi dana bantuan yang didapatkan dari Pemerintah Pusat (Ernawati & Riharjo, 2017). Sejalan dengan hal itu, dalam keuangan desa total PADes juga masih relatif kecil dibandingkan dengan total penerimaan dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga dapat dikatakan bahwa desa masih sangat tergantung dengan pemberian dana dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Anggaran dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Terbukti dari tahun 2016 hingga 2020 secara berturut-turut dana desa yang disalurkan yaitu Rp 45,61 triliun, Rp 57,56 triliun, Rp 56,90 triliun, Rp 67,26 triliun, Rp 72,42 triliun. Namun, dari besarnya dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat tersebut belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan di desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam dialog interaktif Diseminasi Dana Desa di Kabupaten Magelang (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). Tingkat ketergantungan desa terhadap dana transfer pemerintah ini harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah Desa agar dapat tercapai desa yang mandiri. Ketepatan alokasi dana desa juga diperlukan untuk mencapai kemandirian desa.

Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Trenggalek masih terasa belum ada peningkatan. Banyak jalan di desa yang sudah lama rusak tapi belum diperbaiki, saluran irigasi yang tidak terawat, dan masih ada masyarakat desa yang mengalami kesulitan ekonomi. Potensi-potensi yang ada di desa pun juga belum diberdayakan secara baik oleh pemerintah desa. Fenomena tersebut dapat terjadi karena kurangnya kemandirian desa dalam mengatur dana yang didapatkannya. Alokasi dana desa yang dapat digunakan dalam mengembangkan potensi desa belum terealisasi dengan baik, terbukti dengan jumlah alokasi dana desa di hampir semua desa yang berada di Kabupaten Trenggalek masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan asli desa. Hal itu berarti bahwa mayoritas desa di Kabupaten Trenggalek masih bergantung dengan bantuan dana dari pemerintah pusat/kabupaten. Ketergantungan desa di Kabupaten Trenggalek terhadap pembiayaan dari pemerintah Kabupaten ini dapat berdampak pada kinerja keuangan desa jika terjadi keterlambatan pemberian ADD dari pemerintah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andriani & Wahid (2018) menemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Triganda (2018) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan, menurut penelitian Raun, Amran, dan Hanly (2021) menemukan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Halmahera Tengah. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu dengan menambah variabel pendapatan asli desa terhadap kemandirian keuangan desa. Selain itu, pada objek penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triganda (2018) dan Kristina, et al. (2021) berpusat pada Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan objek pada penelitian ini berpusat pada desa di Kabupaten Trenggalek.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli desa dan alokasi dana desa terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek?
2. Apakah Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek?
3. Apakah Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Alokasi Dana Desa (ADD) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek?

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Teori Stewardship**

Teori Stewardship mendeskripsikan kondisi dimana para manajer tidak termotivasi oleh tujuan individu, namun lebih termotivasi dengan hasil untuk kepentingan organisasi. Dalam teori ini manajer berperan sesuai dengan tugasnya dengan lebih mementingkan kebutuhan bersama daripada kebutuhan pribadinya (Davis & Donaldson, 1991). Ketika steward dan pemilik memiliki keinginan yang berbeda, maka steward akan memilih untuk bekerjasama daripada melakukan pertentangan, karena steward lebih mengutamakan usaha untuk mencapai tujuan bersama dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan bertindak sesuai dengan tindakan pemilik.

## **Pendapatan Asli Desa**

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 71 tentang Desa mendeskripsikan PADes sebagai dana yang diperoleh atas segala kegiatan usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa sebagai penunjang dalam perwujudan pemerintahan desa yang otonom. Kategori PADes menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2020) adalah sebagai berikut:

- a. Hasil usaha,
- b. Hasil aset atau kekayaan desa,
- c. Swadaya, partisipasi, dan gotong royong,
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa.

Pendapatan Asli Desa (PADes) dikelola melalui APBDes yang ditentukan setiap tahun. Indikator dalam manajemen PADes yaitu sebagai berikut (Almaherani, 2021):

- a. Transparan, yaitu keuangan desa dikelola dengan asas keterbukaan dimana semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan.
- b. Akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.
- c. Partisipatif, yaitu semua lembaga dan unsur masyarakat desa ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- d. Tertib dan disiplin, yakni keuangan desa dikelola berdasarkan pedoman atau aturan yang ada.

## **Alokasi Dana Desa**

Alokasi dana desa (ADD) ialah perolehan dana dari Kabupaten dan bagian dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten dari pemerintah pusat dan daerah. (Susila, 2019). ADD memiliki fungsi untuk mendanai program pemerintah desa dalam upaya memberdayakan masyarakat. Peningkatan kemampuan organisasi masyarakat desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa menjadi tujuan dari adanya ADD.

Adanya ADD merupakan perwujudan dari pemenuhan hak desa sebagai desa yang otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri tata kelola pemerintahannya. Menurut Irmawati, (2015), prinsip manajemen ADD mengikuti prinsip *good governance* sebagai berikut:

- a. Prinsip partisipatif, yakni dalam proses pengelolaan ADD mulai dari awal hingga akhir harus mengikutsertakan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, BPD, pengurus LPM/RT/RW, maupun masyarakat lain.
- b. Prinsip transparan, yaitu seluruh proses penyelenggaraan ADD harus terbuka dan dapat diketahui

oleh semua pihak.

- c. Prinsip akuntabel, yaitu seluruh proses dalam penggunaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak, khususnya masyarakat desa.
- d. Prinsip kesetaraan, yaitu seluruh pihak yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan alokasi dana desa memiliki kesetaraan hak dan kedudukan.

Pengelolaan alokasi dana desa harus memihak masyarakat, dengan penggunaan ADD minimal 70% untuk penyelenggaraan pembangunan, baik pembangunan fisik, non fisik, sumber daya manusia, ekonomi, maupun sosial budaya. Sedangkan 30% digunakan untuk biaya belanja operasional yang berupa Biaya Operasional sekretariat Desa, Bantuan Tunjangan Anggota BPD, Bantuan Tunjangan Aparat Pemerintah Desa (BTAPD), dan lain sebagainya.

### **Kemandirian Keuangan Desa**

Menurut Endah (2019), kemandirian desa merupakan kemampuan pemerintah serta masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan desa melalui seluruh potensi yang ada di desa. Kemandirian desa dapat terwujud apabila pemerintah dan masyarakat desa memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan perubahan terhadap ketergantungan desa dengan pemerintah pusat. Kemandirian desa dapat dilakukan dengan melakukan pemberdayaan kemampuan masyarakat dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Rasio kemandirian keuangan desa dapat diukur dengan perbandingan PADes dibagi total penerimaan keuangan dari pemerintah Kabupaten/Kota. Rasio kemandirian dapat menunjukkan tingkat kontribusi masyarakat terhadap pembangunan desa. Tingginya rasio kemandirian daerah dapat menunjukkan kemakmuran suatu daerah yang ditandai dengan tingginya kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah (Triganda, 2018).

Kemandirian suatu daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:

- a. Potensi ekonomi daerah, dimana PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) digunakan sebagai indikator dalam mengukur potensi ekonomi daerah.
- b. Kinerja Dinas Pendapatan Daerah. Upaya meningkatkan kemandirian suatu daerah dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan lembaga serta pemanfaatan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa**

PADes berperan dalam mewujudkan kemandirian keuangan desa. Triganda (2018) dan Kristina, et al. (2021) mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh PAD terhadap kemandirian

keuangan daerah secara positif signifikan. Pendapatan asli desa dapat menunjang kegiatan operasional desa dalam membiayai kebutuhan belanja desa. Manajemen keuangan desa yang baik dan optimal dapat meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga mendukung desa untuk lebih sejahtera serta tingkat ketergantungan desa terhadap dana transfer dari pemerintah akan lebih rendah. Semakin besar total pendapatan asli desa dibanding total bantuan yang diterima dari pemerintah maka semakin tinggi kemandirian keuangan desa. Sebaliknya, semakin kecil total pendapatan asli desa dibanding total bantuan keuangan dari pemerintah maka tingkat kemandirian desa semakin rendah. Pengoptimalan keuangan desa tergantung dengan kemampuan pemerintah desa, sehingga penting bagi pemerintah desa dalam memahami pengelolaan desanya dengan baik (Saputra et al., 2019). Pengelolaan keuangan desa dapat mempengaruhi PADes. Pengelolaan keuangan yang efektif dapat meningkatkan PADes sehingga dapat dicapai desa mandiri (Arini et al., 2021).

Besarnya pendapatan asli desa menunjukkan bahwa desa telah mampu mengelola dan memanfaatkan dengan baik dana desa yang telah didapatkan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli desa merupakan penerimaan dana yang berasal dari usaha desa itu sendiri sehingga dapat mencerminkan konsistensi riil suatu desa. Jika pendapatan asli desa besar maka desa tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis di bawah ini:

H<sub>1</sub>: Pendapatan Asli Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa**

Andriani & Wahid (2018) mengemukakan bahwa dana perimbangan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara negatif signifikan. Selain itu, Elmiza & Arza (2020) menemukan bahwa dana transfer juga mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa dengan arah negatif. Jadi, semakin tinggi dana transfer atau total bantuan pemerintah pusat akan semakin rendah tingkat kemandirian desa serta kinerja keuangan pemerintah semakin menurun. Hal itu karena tingginya total bantuan dari pemerintah mengakibatkan suatu daerah semakin bergantung dengan pemerintah pusat. Alokasi dana desa merupakan implementasi desentralisasi menuju kemandirian desa (Kalontong et al., 2019). Besarnya ADD yang diberikan kepada desa, dapat mempengaruhi tingkat pembangunan desa yang dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat (Handayani & Badrudin, 2019). Kemampuan pemerintah desa dalam melakukan pengendalian pengelolaan ADD sangat diperlukan untuk mewujudkan kemandirian desa (Purnama, 2019).

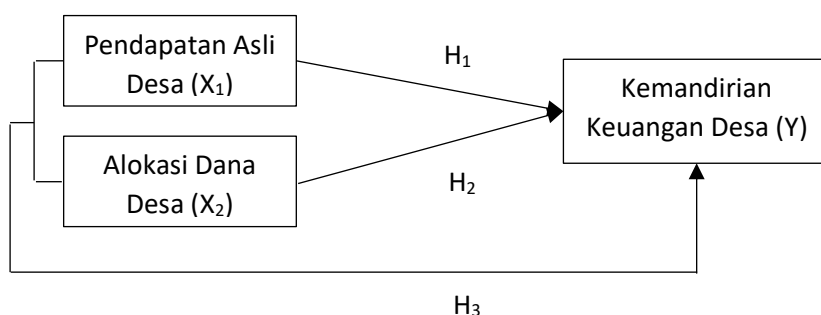
Ketepatan alokasi dana desa dapat meningkatkan kemandirian keuangan desa. Dana desa yang dimanfaatkan dengan baik seperti menggunakan dana desa untuk membiayai kebutuhan dalam rangka memberdayakan potensi-potensi dan usaha yang ada di desa akan dapat menambah pendapatan asli desa, sehingga ketergantungan desa terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat akan berkurang, atau dapat dikatakan tingkat kemandirian desa meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis di bawah ini:

H<sub>2</sub>: Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Desa

### **Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa secara simultan terhadap Kemandirian Keuangan Desa**

Sulistiyoningtyas (2017) menemukan PADes dan ADD secara bersama-sama dapat mempengaruhi tingkat belanja desa. ADD mempengaruhi PADes secara positif signifikan dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk kemandirian desa (Susanto et al., 2021). ADD dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli desa jika pemerintah desa mampu memajukan potensi desa melalui perolehan dana dari pemerintah Kabupaten. Untuk mencapai desa yang mandiri diperlukan peningkatan manajemen keuangan desa yang tersusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Keberhasilan pemerintah desa dalam menyusun APBDes dapat mempengaruhi keberhasilan tahap pengelolaan keuangan desa selanjutnya (Handayati & Palil, 2020). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dirumuskan hipotesis di bawah ini:

H<sub>3</sub>: Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Desa.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## **C. METODE PENELITIAN**



Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana PADes dan ADD digunakan sebagai variabel yang memberikan pengaruh kepada kemandirian keuangan desa sebagai variabel terikat. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes Kabupaten Trenggalek periode 2020. Data ini didapatkan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Trenggalek. Populasi berjumlah 152 desa meliputi seluruh desa yang berlokasi di Kabupaten Trenggalek. Dari total populasi diambil sampel jenuh (*total sampling*) dengan tujuan agar informasi yang diperoleh akurat. Jumlah sampel yang banyak akan lebih mencerminkan populasi (Alwi, 2012). Namun, dari total sampel tersebut terdapat beberapa data ekstrim sehingga harus di *outlier*.

Tabel 1. Pengambilan Sampel

| Keterangan  | Jumlah |
|---|--------|
| Data yang diperoleh dari seluruh desa di Kabupaten Trenggalek | 152    |
| Data ekstrim yang harus di <i>outlier</i>                     | (25)   |
| Total sampel yang digunakan                                   | 127    |

Dari tabel diatas, diperoleh total sampel sebanyak 127 sampel. Analisis data dilakukan dengan menguji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Adapun uji autokorelasi dalam asumsi klasik tidak digunakan dalam analisis data, karena uji autokorelasi digunakan untuk menguji data *time series* atau runtut waktu (Mauludi, 2020). Sedangkan, data dalam penelitian ini menggunakan 1 tahun periode. Data yang diperoleh diuji menggunakan program *IBM SPSS Statistic 25*.

## Definisi Operasional Variabel

### 1. Pendapatan Asli Desa ( $X_1$ )

Pendapatan asli desa ialah penerimaan dana dari seluruh usaha desa yang berguna untuk membiayai kegiatan desa dan menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa.

$$PADes = Hasil Usaha + Hasil Aset + Swadaya, \\ Partisipasi, dan Gotong royong + Lain^2 Pendapatan Asli Desa$$

### 2. Alokasi Dana Desa ( $X_2$ )

Alokasi dana desa (ADD) ialah keuangan yang diperoleh dari APBD Kabupaten yang diberikan guna membiayai kebutuhan desa dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

$$ADD = \text{Dana Perimbangan Daerah} \left( \frac{DAU, \text{Bagi Hasil Pajak,}}{\text{Bagi Hasil SDA}} \right) - \text{Belanja Pegawai}$$

### 3. Kemandirian Keuangan Desa (Y)

Kemandirian desa ialah kemampuan pemerintah serta masyarakat desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan melalui sumber daya dan potensi yang terdapat di desa.

$$\text{Kemandirian Keuangan Desa} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Dana Transfer}} \times 100\%$$

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

|                                       | <i>N</i> | <i>Minimum</i> | <i>Maximum</i> | <i>Mean</i> | <i>Std. Deviation</i> |
|---------------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| PADes                                 | 127      | ,00            | 30608,09       | 11961,3947  | 6027,70671            |
| ADD                                   | 127      | 22526,34       | 29005,19       | 25445,7336  | 1440,80206            |
| Kemandirian<br>Keuangan<br>Desa       | 127      | ,00            | ,77            | ,2940       | ,15556                |
| <i>Valid N</i><br>( <i>listwise</i> ) | 127      |                |                |             |                       |

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel 2 tersebut memberikan informasi diantaranya, nilai terendah variabel kemandirian keuangan desa sebagai variabel terikat (Y) ialah 0,00, nilai tertinggi 0,77, nilai rata-rata 0,2940, dan nilai standar deviasi 0,15556. Sedangkan pada variabel bebas pendapatan asli desa ( $X_1$ ) diperoleh nilai terendah ialah 0,00, nilai tertinggi 30608,09, nilai rata-rata 1196,3947, dan nilai standar deviasi 6027,71. Sementara itu, variabel bebas alokasi dana desa ( $X_2$ ) mempunyai nilai terendah 22526,34, nilai tertinggi 29005,19, nilai rata-rata 25445,7, dan standar deviasi 1440,8.

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menguji normal atau tidaknya distribusi data. Data dapat dikatakan normal jika data yang menyebar atau bisa mewakili populasi (Sujarweni, 2015). Pengujian normalitas menggunakan *one-sample kolmogorov-smirnov test*. Dari data sebanyak 127 sampel, diperoleh hasil *asympt. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,066 > 0,05$ , sehingga data diasumsikan menyebar secara normal.

### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas ialah uji yang berguna untuk mengetahui dalam suatu model data terdapat korelasi antar variabel independen atau tidak (Sujarweni, 2015).

Tabel 3. Uji Multikolinieritas

| Model                | Tolerance | VIF   |
|----------------------|-----------|-------|
| Pendapatan Asli Desa | 0,989     | 1,011 |
| Alokasi Dana Desa    | 0,989     | 1,011 |

Sumber: Data diolah, 2022

Tabel diatas menunjukkan  $\alpha$  hitung  $> \alpha$  dan VIF hitung  $< VIF$  yakni  $0,989 > 0,10$  dan  $1,011 < 10$ , artinya dalam data penelitian ini tidak ditemukan masalah multikolinieritas sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas ialah uji yang berguna untuk mengetahui ketidaksamaan residual pengamatan yang satu dengan yang lainnya (Sunyoto, 2012). Jika terjadi kesamaan maka terjadi masalah heteroskedastisitas. Alat uji heteroskedastisitas yang digunakan ialah uji *glejser*.

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

|                         | Unstandardized<br>Coefficient B | Std.<br>Error | Standardized<br>Coefficient Beta | t     | Sig. |
|-------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|------|
| (Constant)              | -,019                           | ,020          |                                  | -,960 | ,339 |
| Pendapatan Asli<br>Desa | 2,621E-8                        | ,000          | ,013                             | ,144  | ,885 |
| Alokasi Dana Desa       | 1,261E-6                        | ,000          | ,148                             | 1,661 | ,099 |

Sumber: Data diolah, 2022

Mengacu pada tabel 4 diatas, hasil perhitungan heteroskedastisitas diperoleh nilai signifikansi  $> 0,05$  yakni pada variabel Pendapatan Asli Desa  $0,885 > 0,05$  dan pada variabel Alokasi Dana Desa (ADD)  $0,99 > 0,05$ . Artinya, dalam data penelitian tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.

## Hasil Uji Hipotesis

### a. Uji t

Uji t berguna untuk mengukur besarnya variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat secara parsial (Sujarweni, 2015).

Tabel 5. Uji t

|                      | <i>Unstandardized<br/>Coefficients</i> | <i>Std.<br/>Error</i> | <i>Standardized<br/>Coefficients<br/>Beta</i> | <i>T</i> | <i>Sig.</i> |
|----------------------|--|-----------------------|---|----------|-------------|
| <i>(Constant)</i>    | 0,282                                  | 0,30                  |   | 9,496    | 0,000       |
| Pendapatan Asli Desa | 2,520E-5                               | ,000                  | ,976  | 92,138   | 0,000       |
| Alokasi Dana Desa    | -1,137E-5                              | ,000                  | -,105   | -9,935   | 0,000       |

Sumber: Data diolah, 2022

Mengacu informasi pada tabel 5 diatas yang menunjukkan bahwa:

- 1) PADes memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan desa yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , serta nilai t-hitung 92,138 yang lebih besar dari t-tabel 1,97928.
- 2) ADD memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan desa yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , serta nilai t hitung -9,935 yang lebih kecil dari t tabel 1,97928.

### b. Uji f

Tabel 6. Uji f

|  | Sum of<br>Squares | df | Mean<br>Square | F | Sig. |
|--|-------------------|----|----------------|---|------|
|--|-------------------|----|----------------|---|------|

|            |       |     |       |          |                   |
|------------|-------|-----|-------|----------|-------------------|
| Regression | 3,007 | 2   | 1,504 | 4439,737 | ,000 <sup>b</sup> |
| Residual   | ,042  | 124 | ,000  |          |                   |
| Total      | 3,049 | 126 |       |          |                   |

Sumber: Data diolah, 2022

Mengacu informasi tabel 6 diatas, diketahui f-hitung 4439,737 lebih besar dari f-tabel 3,07, dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ , artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan PADes dan ADD terhadap kemandirian keuangan desa.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 7. Analisis Koefisien Determinasi

| <i>R</i>           | <i>R Square</i> | <i>Adjusted R Square</i> | <i>Std. Error of the Estimate</i> |
|--------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 0,993 <sup>a</sup> | 0,986           | 0,986                    | 0,01840                           |

Sumber: Data diolah, 2022

Mengacu informasi dari tabel 7 diatas, diketahui bahwa *Adjusted R square* memiliki nilai sebesar 0,986, yang artinya 98,6% kemandirian keuangan desa dipengaruhi oleh PADes dan ADD. Sedangkan sisanya sebesar 1,4% mengindikasikan presentase kemandirian keuangan desa dipengaruhi oleh elemen lain.

## Pembahasan Hipotesis

### Pengaruh Pendapatan Asli Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa

Mengacu informasi pada tabel 5, yang menunjukkan bahwa PADes mempunyai nilai t-hitung sebesar 92,138 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,97928 dan mempunyai nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Jadi, dapat dikatakan bahwa PADes mempengaruhi kemandirian keuangan desa secara signifikan dengan arah positif di Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut mengindikasikan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) diterima, yang artinya semakin besar total PADes akan membuat tingkat kemandirian keuangan desa juga semakin tinggi, dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian, pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek harus mengoptimalkan strategi pengembangan dan

pemanfaatan potensi desanya, sehingga pendapatan desa akan bertambah dan desa tidak terlalu bergantung dengan dana dari pemerintah pusat. Potensi yang ada di desa harus benar-benar digali dan dimanfaatkan dengan baik. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Trenggalek dalam memberdayakan potensi-potensi yang ada di desa dapat mendukung peningkatan kemandirian keuangan desa. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Triganda (2018) dan Kristina et al. (2021) yang juga mengemukakan bahwa kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh PAD.

### **Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa**

Mengacu informasi pada tabel 5, yakni alokasi dana desa memiliki nilai t-hitung sebesar -9,935 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,97928 dan nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$ . Jadi, dapat dikatakan terdapat pengaruh ADD terhadap kemandirian keuangan desa dengan arah negatif yang mengindikasikan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) diterima. Artinya, jumlah alokasi dana desa yang besar mengakibatkan kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek semakin rendah, dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian, pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek perlu melakukan pengendalian dalam manajemen dana yang didapatkan dari pemerintah Kabupaten. ADD yang diterima oleh pemerintah desa harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengembangkan potensi desa, sehingga dapat menambah penghasilan desa dan dapat tercapai kemandirian desa. Jumlah ADD di setiap desa di Kabupaten Trenggalek mayoritas lebih besar dibandingkan dengan PADes. Sehingga, untuk mencapai kemandirian keuangan desa, maka pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek harus melakukan upaya atau strategi agar ADD di setiap desa di Kabupaten Trenggalek bisa lebih kecil dibanding pendapatan asli desa. Karena jika ADD lebih kecil dibanding PADes, maka desa tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang kuat sehingga ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat menurun dan kemandirian keuangan desa meningkat.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Andriani & Wahid (2018) yang mengemukakan dana perimbangan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah secara negatif signifikan. Hasil ini juga selaras dengan penelitian Elmiza & Arza (2020) yang mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan dana transfer terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa**

Mengacu informasi pada tabel 6, diperoleh f-hitung  $> f$ -tabel, yaitu  $4439,737 > 3,07$ , dan nilai signifikansi diperoleh  $0,000 < 0,05$ . Jadi, dapat dikatakan bahwa secara bersama-sama PADes dan

ADD memberikan pengaruh signifikan kepada kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek, sehingga hipotesis yang diajukan peneliti ( $H_3$ ) diterima. Hasil perhitungan *Adjusted R square* menunjukkan nilai sebesar 0,986, yang artinya 98,6% kemandirian keuangan desa dipengaruhi oleh PADes dan ADD di Kabupaten Trenggalek. Sedangkan sisanya sebesar 1,4% mengindikasikan presentase kemandirian keuangan desa dipengaruhi oleh elemen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Hal ini berarti PADes dan ADD memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen keuangan yang optimal di setiap desa di Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan desa yang mandiri dan tidak tergantung dengan keuangan pemerintah pusat. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Sulistiyoningtyas (2017) yang mengemukakan bahwa secara simultan PADes dan ADD mempengaruhi tingkat belanja desa.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini ialah pendapatan asli desa mempengaruhi secara signifikan kemandirian keuangan desa dengan arah positif di Kabupaten Trenggalek. Artinya semakin besar jumlah PADes maka dapat membuat tingkat kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek akan semakin tinggi, begitu juga sebaliknya. Hal ini karena semakin besar PADes, maka desa tidak terlalu bergantung dengan dana pemerintah serta kebutuhan belanja desa dapat dibiayai oleh pendapatan asli desa yang diperoleh desa itu sendiri.

Sedangkan, alokasi dana desa mempengaruhi kemandirian keuangan desa secara signifikan dengan arah negatif di Kabupaten Trenggalek. Artinya semakin besar jumlah ADD yang diterima desa maka dapat membuat tingkat kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek semakin rendah, begitu pula sebaliknya. Hal ini karena ADD termasuk dalam dana bantuan dari pemerintah. Sehingga semakin banyak ADD, maka desa semakin tergantung dengan dana bantuan dari pemerintah pusat, sehingga desa menjadi tidak mandiri.

Selain itu, PADes dan ADD juga memberikan pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek dengan nilai koefisien determinasi 0,986. Artinya 98,6% kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek dipengaruhi oleh PADes dan ADD. Sedangkan, 1,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini berarti PADes dan ADD memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek. Sehingga, perlu dilakukan manajemen keuangan yang optimal di setiap desa

di Kabupaten Trenggalek untuk mewujudkan desa yang mandiri dan tidak tergantung dengan keuangan dari pemerintah pusat.

## 2. Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya manajemen keuangan desa yang baik agar desa di Kabupaten Trenggalek bisa mandiri. Pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan baik untuk menciptakan kemandirian keuangan desa. Alokasi dana desa yang diperoleh dari pemerintah kabupaten harus dikelola dengan baik oleh pemerintah desa di Kabupaten Trenggalek, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Pemberdayaan potensi-potensi desa dan usaha desa harus lebih digencarkan agar pendapatan desa semakin meningkat dan ketergantungan desa terhadap bantuan dana dari pemerintah pusat semakin rendah. Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat desa di Kabupaten Trenggalek dalam memberdayakan potensi desa juga diperlukan untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan desa di Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni penggunaan sampel terbatas satu Kabupaten. Hal ini karena terdapat keterbatasan waktu dan akses informasi bagi peneliti untuk mendapatkan lebih banyak sampel. Keterbatasan lainnya yaitu periode yang digunakan dalam penelitian terbatas satu tahun saja. Peneliti berikutnya dapat menambah jumlah sampel dan periode untuk mengkaji lebih dalam serta agar hasil penelitian mencakup jangkauan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almaherani, R. (2021). *Pengelolaan Sumber Pendapatan Asli Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*. Universitas Bosowa.
- Alwi, I. (2012). Kriteria Empirik dalam Menentukan Ukuran Sampel Pada Pengujian Hipotesis Statistika dan Analisis Butir. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 2(2), 140–148. <https://doi.org/10.30998/formatif.v2i2.95>
- Andriani, R. N. R., & Wahid, N. N. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 30–39.
- Arini, F. R., Ichi, I., & Putri, T. E. (2021). Determinant Factors That Influence the Original Income of the Village. *ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja)*, 5(01), 89–102. <https://doi.org/10.35310/accruals.v5i01.686>
- Atmadja, A. T., Saputra, K. A. K., & Koswara, M. K. (2018). The influence of village conflict, village apparatus ability, village facilitator competency and commitment of local government on the success of budget management. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 22(1).
- Davis, J. H., & Donaldson, L. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and



Shareholder Returns. *Australia Journal of Manajemen*, 16(1).

- Elmiza, E., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Faktor Finansial Dan Faktor Non Finansial Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2807–2825. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.250>
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Moderat*, 4(4), 25–33. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Ernawati, & Riharjo, I. B. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(2), 531–545.
- Handayani, A. P., & Badrudin, R. (2019). Evaluation of Village Fund Allocation on Indonesia. *Journal of Accounting and Investment*, 20(3). <https://doi.org/10.18196/jai.2003129>
- Handayati, P., & Palil, M. (2020). The Village Financial Management System: A Policy Towards Independent Villages. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 12(1), 1–9. <https://doi.org/10.17977/um002v12i12020p001>
- Irmawati. (2015). *Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Jeneponto*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Kalontong, E., Anggraeni, A., & Tiawon, H. (2019). Analysis Of Village Fund Management On Regional Development. *Jejak*, 12(2), 498–519. <https://doi.org/10.15294/jejak.v12i2.21660>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Dana Desa Belum Turunkan Kemiskinan*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/dana-desa-belum-turunkan-kemiskinan/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Buku Pintar Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat*. DJPK. <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=17351>
- Kristina, S. R., Naukoko, A. T., Siwu, H. F. D. J., Pendapatan, P., Daerah, A., Dan, P. A. D., Perimbangan, D., Ilmu, J., Pembangunan, E., Ekonomi, F., Kristina, S. R., Naukoko, A. T., & Siwu, H. F. D. J. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 453–461.
- Mauludi, A. (2020). *Analisis Data Dengan Statistik*. Jakarta: Alim's Publishing.
- Purnama, D. B. (2019). Implementation of Internal Control of Village Fund Allocation Management on Village Performance Accountability (Case Studies in All Villages of Padangan District, Bojonegoro Regency in 2019). *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 4(4), 1224–1256. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>
- Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40>
- Sujarweni. (2015). *Metodologi Penelitian - Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru.

- Sulistiyoningtyas, L. (2017). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa di Kecamatan Baron. *Simci-Economic*, 1(3), 1–14. <http://simki.unpkediri.ac.id/detail/13.1.02.01.0328>
- Sunyoto, D. (2012). *Analisis Validitas & Asumsi Klasik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Susanto, A. W., Khusaini, M., & Badriyah, N. (2021). The Role of Village Funds in Village Financial Independence. *Journal of Indonesian Applied Economics*, 9(1), 32–40. <http://doi.org/10.21776/ub.jiae.2021.009.01.4>
- Susila, I. (2019). An Analysis of The Effectiveness of Allocation of Village Fund Policy Implementation and Its Determining Factors in Gorontalo Regency. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 191–202. <http://ojs.unm.ac.id>
- Triganda, R. (2018). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2012-2015*. Universitas Sumatera Utara.
- Yulihantini, D. T., Sukarno, H., & Wardayati, S. M. (2018). Pengaruh Belanja Modal Dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian Dan Kinerja Keuangan Desa Di Kabupaten Jember. *Bisma*, 12(1), 37. <https://doi.org/10.19184/bisma.v12i1.7600>